



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 239/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, salah satu bentuk dukungan perlengkapan lainnya adalah Formulir dan Sertifikat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Formulir dan Sertifikat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan ...

7. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 260/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Formulir dan Sertifikat sebagaimana terdapat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 239/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Formulir dan Sertifikat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JENIS DAN SPESIFIKASI FORMULIR DAN SERTIFIKAT

A. Jenis dan Spesifikasi

Bahan : HVS 70 gram;

Warna : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%);

Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);

Cetak : Satu muka (1/0);

Pengaman : Khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1- KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.

B. Penggunaan dan Jumlah

No	Jenis Formulir dan Sertifikat	Satuan Kebutuhan	Peruntukan	Jumlah
TPS				
1.	Model C-KWK BA pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara	4 set ditambah sejumlah Saksi	2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	6.860 set
2.	Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	6 set ditambah sejumlah Saksi	* 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS; * 1 set ditempel pada papan pengumuman	8.820 set

			di PPS; * 2 set untuk PPK ; * 1 set untuk KPU Kota; * 1 set untuk pengawas TPS; * 1 set untuk masing-masing saksi	
3.	Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS	6 set ditambah sejumlah Saksi	* 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS; * 1 set ditempel pada papan pengumuman di PPS; * 2 set untuk PPK ; * 1 set untuk KPU Kota; * 1 set untuk pengawas TPS; * 1 set untuk masing-masing saksi	8.820 set
4.	Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS	1 set	untuk <i>tally</i> di TPS	980 set
5.	Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	Sejumlah saksi	untuk masing-masing Saksi	2.940 set
6.	Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	10 lembar tiap TPS	Pemilih Disabilitas	9.800 lembar
7.	Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS	2 set	* 1 set KPPS * 1 Set PPS	1.960 set
8.	Model C5-KWK Tanda Terima Penyampaian BA dan Sertifikat Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	1 lembar tiap TPS	Pengawas TPS dan Masing-masing Saksi	980 lembar

9.	Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih	1 lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam DPT	375,722 lembar
10.	Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS	1 set	TPS	980 set
PPS				
1.	Model D-KWK BA Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat TPS	2 lembar tiap PPS	* 1 set untuk PPK ; * 1 set untuk PPS	30 set
2.	Model D1-KWK Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK yang tidak terdistribusi)		* 1 lembar untuk arsip KPPS; * 1 lbr untuk PPS	30 lembar
3.	Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	3 lembar tiap PPS (Apabila dalam 1 Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 TPS maka disediakan sesuai kebutuhan)	PPS untuk disampaikan ke KPU Kota melalui PPK	45 lembar
PPK				
1.	Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan ditingkat kecamatan	1 set/PPK	u/PPK	3 set
2.	Model DAA Plano KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan	1 set/PPK	u/ <i>tally</i> ditingkat PPK	3 set
3.	Model DA-KWK BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara ditingkat Kecamatan	2 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set asli u/ KPU Kota; * 1 set salinan u/ Panwascam * 1 set salinan u/ masing-masing saksi	15 set

4.	Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / kelurahan ditingkat Kecamatan	3 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set asli untuk KPU Kota; * 1 set salinan untuk diumumkan di PPK; * 1 set salinan untuk Panwasdam; * 1 set salinan untuk masing-masing Saksi	18 set
5.	Model DA1-KWK Plano Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / kelurahan ditingkat Kecamatan	1 set	u/ PPK	3 set
6.	Model DA2-KWK catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan	Sejumlah Saksi	u/masing-masing Saksi	3 set
7.	Model DA3-KWK BA Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS	2 lbr setiap PPS	*1 lbr u/ PPS ; *1 lbr u/ PPK ;	90 lembar
8.	Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan	2 lbr setiap PPK	*1 lbr u/ PPK ; *1 lbr u/ KPU Kota;	6 lembar
9.	Model DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan	1 lbr	u/PPK	3 lembar

10.	Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan	1 lbr ditambah Panwascam, PPS & sejumlah Saksi	* 1 lbr u/KPUKota; * 1 lbr u/ Panwascam; * 1 lbr u/ Ketua/Anggota /Sekretariat PPS diwilayah Kecamatan ; * 1 lbr u/ masing-masing Saksi	18 lembar
11.	Model DA7-KWK daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan	1 set	u/PPK	
KPU Kota Cimahi				
1.	Model DB-KWK BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat kota	3 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set untuk KPUKota; * 1 set u/ KPU Prov * 1 set u/ Panwas Kota * 1 set u/ masing-masing Saksi	6 set
2.	Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kota	3 set ditambah sejumlah saksi	* 1 set u/diumumkan di KPU Kota; * 1 set u/ KPU Prov; * 1 set u/masing-masing Saksi	6 set
3.	Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota	sejumlah saksi	untuk masing-masing Saksi	3 set
4.	Model DB3-KWK BA Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan	2 lbr	* 1 lbr u/ PPK; * 1 lbr u/ arsip KPU Kota	2 lembar

5.	Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota	2 lbr	* 1 lbr u/KPU Provinsi; * 1 lbr u/ arsip KPU Kota	2 lembar
6.	Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota	1 lbr		1 lembar
7.	Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara ditingkat Kota	Sejumlah PPK ditambah Saksi ditambah Panwaslih	* 1 lbr u/ masing-masing Saksi * 1 lbr u/ Panwaslih * 1 lbr u/ masing-masing Ketua PPK diwil Kota * 1 lbr u/ KPU Prov sbg tembusan	8 lembar
8.	Model DB7-KWK Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	1 set		1 set
9.	Model DB-8 KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan dari setiap kelurahan dlm Kota	1 set		1 set
J U M L A H				417.859

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

Supriatna Sumarya